



VISI MISI GUBERNUR DIY Fokus Selatan, Reformasi Kelurahan dan TI



KR-Franz Budisukamanto

Sultan HB X membacakan visi misi di DPRD DIY.

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyampaikan ada tiga yang saling berkaitan dan menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2022-2027. Kawasan selatan, reformasi kelurahan dan teknologi informasi adalah tiga hal yang menjadi visi misi Gubernur DIY 2022-2027.

Ketiga hal tersebut apabila digam-

barkan dengan diagram segitiga. Maka akan didapati 'Kawasan Selatan' sebagai ontologi ada pada kaki kiri segitiga, 'Reformasi Kelurahan' sebagai epistemologi ada pada kaki kanan segitiga dan 'Teknologi Informasi dan Budaya Inovasi' sebagai alat yang memiliki kapasitas aksiologis ada pada titik atas segitiga.

* **Bersambung hal 7 kol 5**

Fokus **Sambungan hal 1**

Sedangkan di tengah atau pada pusat segitiga didapati 'Pancamulia Manusia Jogja' sebagai tujuan dan sasaran dari visi misi. Keseluruhan perihal yang terkandung didalam segitiga tersebut di atas, dapat diungkapkan dalam proposisi 'Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kelurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi'.

Hal tersebut dikatakan Gubernur DIY Sri Sultan HB X dalam pidato pemaparan visi, misi dan program calon gubernur DIY masa jabatan 2022-2027 dalam rapat paripurna di DPRD DIY, Senin (8/8), Gubernur didampingi GKR Hemas. Hadir juga Wagub DIY Paku Alam X beserta istri serta pejabat terkait di Pemda DIY.

Dipilihnya Kawasan Selatan, sebagai prioritas pembangunan Yogyakarta dalam lima tahun ke depan tentu dengan beberapa pertimbangan. Pertama, kawasan ini yang mencakup wilayah bagian selatan Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul merupakan wilayah yang masih memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi. Dibandingkan wilayah tengah dan utara, Kota Yogyakarta dan Sleman.

Berdasarkan data dari BPS DIY 2022, 18,38 persen penduduk Kulonprogo masih miskin, sementara di Bantul 14,04 persen, di Gunungkidul 17,69 persen, di Sleman 8,64 persen dan di Kota Yogyakarta 7,69 persen.

"Kawasan selatan juga dipahami sebagai kawasan yang memiliki kekhususan teritorial. Ini tercermin dari segi bentang alam, budaya, mata pencaharian warga, keunikan, kearifan serta kecerdasan lokal. Kekhususan teritorial ini nanti juga akan dikembangkan sebagai modal sekaligus model pembangunan kawasan-kawasan lain Yogyakarta. Termasuk wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Dengan perkataan lain, bahwa melalui modal dan model kekhususan teritorial ini, pembangunan Yogyakarta tidak hanya difokuskan di

Kawasan Selatan saja. Melainkan juga menyeluruh ke tengah dan utara. Ibarat kepala, badan, dan kaki, maka Yogyakarta harus dibangun secara utuh dan menyeluruh," ungkapnya.

Reformasi Kelurahan dilekaskan sebagai konsep sekaligus strategi bagi pembangunan dan perubahan-perubahan yang akan dituju oleh Yogyakarta dalam lima tahun ke depan. Alasan dipilihnya konsep dan strategi ini adalah bahwa perubahan zaman telah membawa pada situasi, kondisi, tantangan, permasalahan, sekaligus peluang-peluang yang sangat kompleks, luas, saling mengait dan memiliki kedalaman permasalahan sampai pada tingkat komunitas bahkan individu.

"Kita telah menyaksikan saat ini bahwa kondisi yang telah digambarkan di atas, secara empiris telah membawa perubahan-perubahan besar pada tata sosial, tata budaya, tata ekonomi dan bahkan tata ruang kehidupan dan penghidupan masyarakat Yogyakarta. Kedalaman dan kompleksitas perubahan inilah yang telah menyadarkan kepada kita bahwa solusi-solusi melalui peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan telah sangat mendesak dibutuhkan oleh Yogyakarta untuk menjawab permasalahan dan tantangan tersebut," jelas Sultan.

Lembaga Kelurahan sebagai ujung hirarki dari sistem

tatanan kelembagaan di Yogyakarta yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan modal sekaligus modal bagi upaya Yogyakarta untuk menjawab kompleksitas dan kedalaman permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Yogyakarta.

Lembaga Kelurahan akan menjadi ujung depan bagi upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan warga. Untuk itu, Lembaga Kelurahan harus memiliki kewenangan, kapasitas dan kelincahan yang luas dalam membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di atasnya, lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, lembaga-lembaga swasta, dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di dalam maupun di luar wilayah Yogyakarta, dalam rangka mewujudkan Pancamulia Manusia Jogja. Silang lembaga dan silang wilayah, akan menjadi domain kerja Lembaga Kelurahan.

Khusus untuk Reformasi Kelurahan, arah pembangunan yang sangat penting untuk dilakukan DIY dalam lima tahun ke depan. Membangun tata reformasi Kelurahan yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat, dengan tiga target prioritas. Penurunan angka kemiskinan, penurunan angka stunting dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat. (Awh/Bro)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005